

BAB II

TINJAUAN UMUM GEDUNG PARLEMEN

2.1. Gedung Parlemen

2.1.1. Pengertian Gedung Parlemen

Parliament berasal dari kata “*Parler*” (bahasa Perancis) yang artinya acara yang diatur untuk berbicara dan membahas hal-hal atau isu-isu. Istilah Parlemen digunakan resmi pertama kali pada tahun 1236 yaitu pertemuan konsultasi kerajaan Inggris Raja *John* dengan Dewan besar (*Magnum Concilium*). (www.parliament.uk)

Gedung adalah bangunan tembok yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga atau rumah tembok yang berukuran besar (KBBI, 2013).

Parlemen adalah Badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara atau disebut Dewan Perwakilan Rakyat (KBBI, 2013).

Atau sekumpulan orang yang dipilih atau diutus oleh partai atau kelompok yang berkompoten untuk mensuarakan hal ikhwal yang menyangkut kepentingan rakyat dan negara mengenai aturan-aturan maupun perundang-undangan demi keteraturan dan kelancaran pengelolaan suatu Negara.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. (Permen PU no 45/PRT/M/2007, Bab I Pengertian)

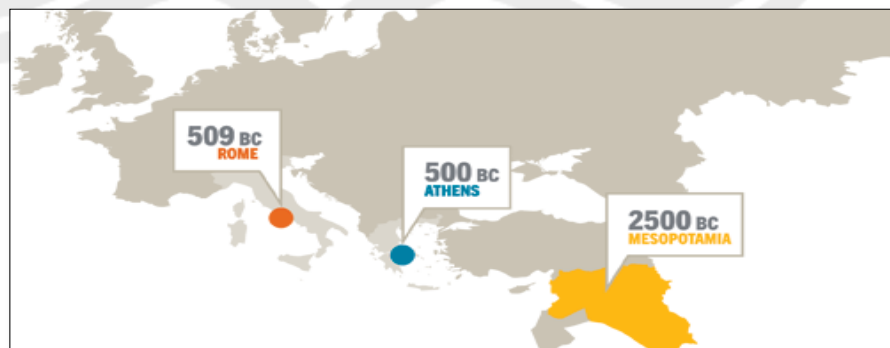
Gedung Parlemen adalah tempat berkumpulnya para wakil rakyat untuk membahas maupun membuat aturan dan perundang-undangan untuk kepentingan rakyat dan negara.

2.1.2. Sejarah Parlemen dan Gedung Parlemen

Makna kata seperti perwakilan, diwakili mungkin sudah terlaksana di seluruh belahan bumi ini dimana pertama kali ada makhluk hidup yang bernama manusia mendiami bumi ini, ada sekelompok komunitas manusia berada di suatu tempat, tentu harus ada satu bahasa atau ungkapan yang bisa dimengerti untuk mengatur atau mengurus kelompok tersebut. Menggunakan makna kata seperti “perwakilan, diwakili” di setiap tempat tentu memiliki ungkapannya yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Akan tetapi makna perwakilan (mewakili suatu kelompok atau komunitas) memiliki sejarah yang teratur pada perjalanan kekuasaan kerajaan di Inggris.

A. Asal Usul Konsep Parlemen

Pada budaya Mesopotamia kuno, ada diadakan pertemuan para pemimpin untuk membahas dan memutuskan hal-hal yang penting bagi kehidupan penguasa maupun seluruh masyarakat yang di kuasai. Ada kelompok atau semacam majelis di dalam pertemuan yang melakukan tindakan seperti pada parlemen sekarang ini, seperti berunding, menyampaikan usulan-usulan, melakukan pemilihan walaupun hanya melalui menunjukan tangan atau mengangkat tangan, kebiasaan seperti ini kemudian di adakan juga pada jaman Yunani kuno maupun Romawi.



Gambar 2.1 Peta Peradaban Perkembangan Parlemen di Dunia

Sumber: www.peo.gov.au



Sekitar 500 SM Yunani kuno membentuk Majelis, atau *Ecclesia*, yang diselenggarakan pada *Pnyx*, sebuah bukit di pusat Athena, Yunani. *The Ecclesia* bertemu 40 kali setahun dan dihadiri oleh warga laki-laki di atas usia 18. Keputusan diambil melalui pemungutan suara, yang dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan suara mayoritas yang akan disetujui.

The Roman, yang didirikan sekitar 509 SM, diperintah oleh dua konsul terpilih, yang bertindak atas saran dari *Senatus* atau dewan sesepuh. *Senatus* yang terdiri 300 anggota yang berasal dari keluarga kaya dan yang status sosial mulia. Hukum disetujui oleh *Senatus* majelis yang mewakili para bangsawan dan masyarakat umum. Majelis ini tidak membuat undang-undang, tetapi hanya bertemu untuk memilih atau terpilih menjadi pejabat.

B. Terbentuknya Parlemen

Tidak ada yang menciptakan parlemen, proses ini berkembang secara alami dari kebutuhan politik sehari-hari Raja Inggris dan dalam pemerintahannya, melalui periode-periodenya. Meskipun perkembangannya tidak sengaja namun tidak serampangan, parlemen Inggris adalah salah satu dewan perwakilan tertua di dunia dalam sejarah peradaban manusia modern.

Parlemen modern Inggris dapat dilacak asal usulnya mulai dari abad ke-8, dalam kerajaan Inggris, Raja akan memanggil penasehatnya yang terkemuka serta para bangsawan untuk membahas hal-hal yang mempengaruhi negara, namun raja tidak perlu persetujuan untuk mengambil tindakan seperti pada sistem parlemen modern. Setelah kerajaan Inggris menaklukkan *Normandia*, Raja Inggris mulai membentuk sebuah dewan kecil sebagai pejabat penasehat Raja, namun kadang Raja akan memanggil para bangsawan dan pimpinan Gereja untuk meminta pendapat terutama mengenai hal perpajakan.



Kaum bangsawan, pangeran, Raja lokal, pemimpin perajutir kerajaan serta pimpinan Gereja merupakan Dewan Besar (*Magnum Concilium*) yang kedudukanya lebih tinggi dari penasehat Raja, dewan ini adalah cikal bakal parlemen atau dewan perwakilan rakyat seperti pada jaman sekarang. Dewan ini selalu melakukan pertemuan rutin untuk membahas masalah-masalah yang timbul, kadang mereka melakukan pertemuan dengan para pemimpin lokal untuk membahas masalah-masalah yang ada.

Pada tahun 1215 Raja *John* diminta untuk menyetujui *Magna Carta* (piagam besar) yaitu usulan dan saran yang disampaikan oleh Dewan Besar (*Magnum Concilium*) memiliki hak-hak hukum (semacam undang-undang), secara tidak langsung Raja harus mematuhi. Dalam perkembanganya justru banyak pangeran yang melakukan pemberontakan terhadap Raja sehingga *Magna Carta* kadang diabaikan.



Gambar 2.2 Raja *John* Menandatangani *Magna Carta*

Sumber: www.peo.gov.au

Parliament berasal dari kata "*Parler*" (bahasa Perancis) yang artinya acara yang diatur untuk berbicara dan membahas hal-hal. Istilah Parlemen digunakan resmi pertama kali pada tahun 1236 yaitu pertemuan konsultasi Raja *John* dengan Dewan besar (*Magnum Concilium*).

Selama beberapa abad parlemen kehadirannya bukan sebagai institusi yang memiliki dasar hukum yang kuat walaupun sudah ada *Magna Carta*, tetapi atas kehendak Raja. Raja mau bertemu dengan siapa, dimana dan kapan, tergantung keinginannya. Pertemuan parlemen di *Oxford* tahun 1258 para bangsawan menyatakan ketidakpuasan terhadap Raja *Henry III* dan mencoba memaksa Raja untuk mematuhi satu paket ketentuan yang disebut ketentuan *Oxford*. Ada beberapa proposal yang di sepakati sebagai ketentuan yaitu pertemuan rutin parlemen tiga kali dalam setahun, harus ada perwakilan dari duabelas distrik yang ada, Raja *Henry III* menolak ketentuan ini dan terjadi perpecahan antara raja dan kaum bangsawan yang dipimpin oleh *Simon de Montfort*.

Pada tahun 1265 *de Montfort* membentuk parlemen sendiri yaitu *Simon de Montfort* parlemen untuk membahas persyaratan perdamaian, parlemen ini memiliki anggota yang semakin luas tidak hanya dari dewan besar tetapi dari semua distrik dan kota, ini awal terbentuknya bentuk parlemen yang modern seperti sekarang ini dan terus mendapat perbaikan.

Dewan besar (*Magnum Concilium*) awalnya tidak memiliki tempat ter-sendiri untuk melakukan pertemuan, sebelum dewan ini hanya sebagai kelompok yang diminta pendapat oleh raja, dewan ini bisa melakukan pertemuan dengan raja di istana, tetapi setelah dewan memiliki kekuatan hukum yang tetap mereka tidak lagi melakukan pertemuan di istana, tetapi di Gereja atau tempat yang disepakati oleh Raja.

Dewan perwakilan atau parlemen mulai memiliki tempat sendiri untuk berkumpul sekitar pertengahan abad ke 15 yaitu dengan nama *House of Parliament* di istana *Westminster*. Namun istana tersebut ikut terbakar pada tahun 1834 pada waktu terjadi kebakaran besar di kota *London*.

(Sumber: website resmi parlemen Inggris <http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/originsofparliament/birthofparliament/>)

Diakses tanggal 17 September 2012 jam 16:00, Yang diterjemahkan bebas oleh penulis

C. Parlemen Di Timor Leste

Terjadinya revolusi di Portugal 25 April 1974, yang di kenal dengan nama *Revolução dos Cravos* atau *Carnation Revolutin* yang kemudian lebih di kenal dengan nama revolusi bunga karena masyarakat menempatkan bunga di setiap laras senjata aparat keamanan yang berjaga di jalan raya, kudeta yang terjadi dikenal juga dengan nama revolusi damai, revolusi ini untuk menjatuhkan penguasa diktator yang sudah berkuasa sekitar 50 tahun.

Kudeta yang terjadi untuk mengembalikan kondisi demokrasi di Portugal, keadaan ini menjadi peluang bagi koloni Portugis di sebrang lautan seperti Timor Leste untuk mewujudkan perjuangannya yang sudah lama di rintis menjadi suatu negara merdeka, kemerdekaan Timor Leste di proklamasikan pada tanggal 28 November 1975 oleh partai Fretilin yang mendapat dukungan mayoritas penduduk Timor Leste pada saat itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, dibentuk badang yang bertugas untuk melengkapi undang-undang yang sebelumnya sudah di buat.

Dengan kondisi yang serba kekurangan, negara baru Timor Leste mempersiapkan diri untuk membentuk organ-organ dalam suatu negara seperti Legislatif, Eksekutif dan yudikatif. Persiapan yang di adakan, tidak sepenuhnya terlaksana karena adanya invasi Indonesia (rejim Soeharto), semua komponen negara yang ada mempersiapkan

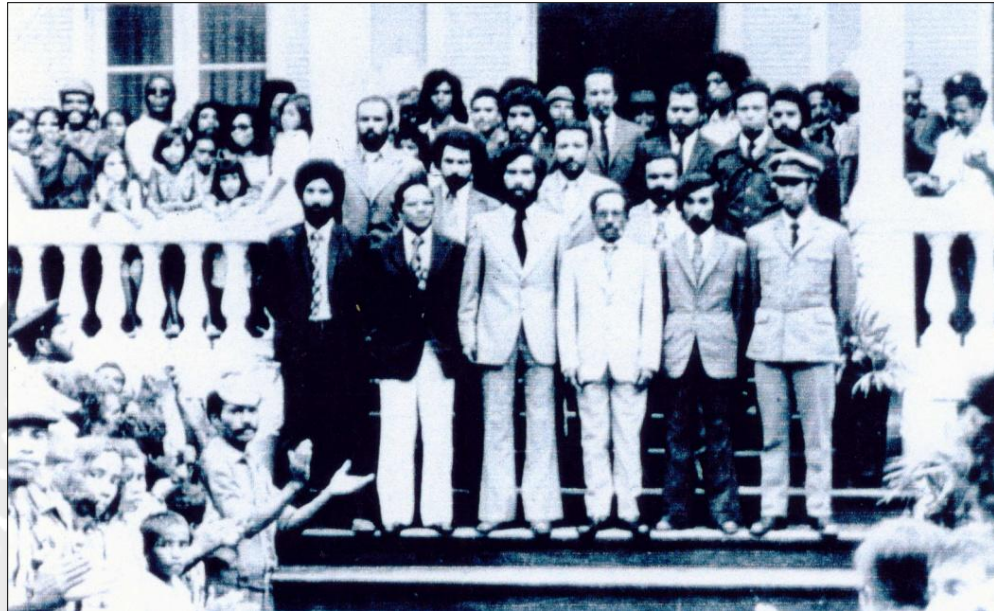
diri untuk menghadapi invasi Indonesia di bawah pemerintahan Soeharto.



Gambar 2.3 Proklamasi kemerdekaan Negara Timor Leste

Sumber: www.parlamento.tls

Invasi Soeharto 7 Desember 1975 menimbulkan perubahan politik di Negara baru Timor Leste, banyak pemimpin perintis kemerdekaan Timor Leste yang terbunuh dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sistem pemerintahan tidak terlaksana, organ parlemen yang ada berubah menjadi pejuang mempertahankan kemerdekaan. Timor Leste memperjuangkan kemerdekaan yang sudah di proklamirkan selama 24 tahun di pada masa pendudukan Indonesia di bawah rejim Soeharto.



Gambar 2.4 Kabinet Pertama Timor Leste sekaligus sebagai Dewan Perwakilan Rakyat.

Sumber: www.parlamento.tls

D. Parlemen Setelah Restorasi Kemerdekaan Timor Leste

Setelah referendum 30 Agustus 1999 yang di menagkan oleh pendukung kemerdekaan Timor Leste, pada tahun 2001 legislasi pertama terpilih menjadi *Assembleia Constituinte* (badan konstitusi), untuk mempersiapkan konstitusi baru bagi negara Timor Leste, badan ini kemudian berubah menjadi anggota parlemen pertama neraga, setelah restorasi kemerdekaan Timor Leste, yang beranggotakan 88 orang, dan menempati bekas gedung keuangan Propinsi Timor-Timur jaman Indonesia. Gedung ini masih di gunakan sebagai gedung parlemen sementara untuk negara Timor Leste.



Gambar 2.5 Gedung Parlemen (sementara) Timor Leste.

Sumber: www.parlamento.tl



Assembleia Constituinte - Março de 2002
Assembleia Representante - Março 2002
Constituency Assembly - March 2002

Gambar 2.6 Anggota Assembleia Constituinte Timor Leste.

Sumber: www.parlamento.tl



Pada tahun 2006 sekitar bulan Mei terjadi permasalahan di angkatan bersenjata Timor Leste yang kemudian muncul kelompok petisioner yang ingin ada suatu perubahan di badan pertahanan Timor Leste, permasalahan ini tidak mendapatkan respon dengan cepat dari pemerintah, sehingga perkembangan permasalahan yang sebelumnya hanya di dalam bidang kemiliteran kemudian berubah menjadi masalah politik dan dialami oleh seluruh masyarakat Timor Leste, sehingga permasalahan ini berujung pada pengunduran diri Perdana Menteri konstitusional pertama *Marí Alkatiri*.

Timor Leste mengalami transisi politik satu tahun untuk mempersiapkan pemilihan umum yang kedua pada bulan Agustus 2007, pemilihan ini menghasilkan pemerintahan konstitusional yang ke dua yang di pimpin oleh Perdana Menteri *José Alexandre Xana Gusmão*, dan terjadi perubahan pada anggota parlemen yang sebelumnya 88 orang, berubah menjadi 65 orang anggota parlemen yang memiliki mandat selama lima tahun.

Pemerintahan konstitusional ke dua Timor Leste berjalan selama lima tahun, kemudian pada Agustus 2012, diadakan pemilihan umum yang ketiga, dan Perdana Menteri *José Alexandre Xana Gusmão* berkusa kembali untuk periode yang kedua, dengan pemerintahan konstitusional yang ke tiga dengan mandat selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2017.

2.1.3. Fungsi dan Aktivitas Gedung Parlemen

Parlemen Nasional adalah lembaga kedaulatan *República Demokrátis Timor Leste* yang mewakili semua warga *Timor Leste* dan diberikan wewenang legislatif, pengawasan dan pengambilan keputusan politik. (UUD *República Democrátika de Timor Leste* pasal 95).



1. Fungsi Umum.

Fungsi gedung parlemen adalah tempat berkumpulnya para wakil rakyat atau tempat kerja para wakil rakyat untuk membahas maupun membuat aturan dan perundang-undangan untuk kepentingan rakyat dan negara, dan aktivitas yang dilakukan seperti:

- a. Membuat perundang-undangan dan aturan mengenai pengelolaan negara.
- b. Mengesahkan program pemerintah dan anggaran belanja negara
- c. Membuat pengawasan terhadap pengelolaan negara oleh pemerintah berdasarkan undang-undang
- d. Melantik presiden sesuai dengan hasil pemilu.
- e. Membahas permasalahan-permasalahan rakyat dan negara.
- f. Sebagai tempat penyampaian permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat dan negara seperti: masalah sosial, politik, ekonomi, hukum dan keamanan

2. Wewenang dan Tanggung jawab Parlemen Nasional Timor Leste .

Parlemen Nasional juga berwewenang dan bertanggung jawab untuk:

- a. Meratifikasi pengangkatan Ketua Mahkamah Agung dan pemilihan Ketua Pengadilan Tinggi Administrasi, Perpajakan dan Pemeriksaan Keuangan
- b. Mempertimbangkan laporan kemajuan kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah
- c. Memilih seorang anggota untuk Dewan Tinggi Kehakiman dan Dewan Tinggi Kejaksaan
- d. Mempertimbangkan Rencana Negara dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara dan laporan pelaksanaannya
- e. Mengawasi pelaksanaan anggaran negara
- f. Mengesahkan dan membatalkan kesepakatan-kesepakatan serta meratifikasi traktat dan perjanjian internasional
- g. Memberikan pengampunan

- h. Merestui lawatan Presiden Republik dalam rangka kunjungan kenegaraan
- i. Mengesahkan Peninjauan Kembali terhadap UUD dengan mayoritas dua pertiga dari Anggota Parlemen
- j. Mengijinkan dan memastikan pengumuman keadaan perang atau keadaan darurat
- k. Mengusulkan kepada Presiden Republik agar jajak pendapat diadakan atas hal-hal yang menyangkut kepentingan negara.

Juga merupakan wewenang dan tanggung jawab Parlemen Nasional untuk

- l. Mengangkat Presiden Parlemen dan anggota-anggota Kursi lainnya
- m. Mengangkat lima orang anggota Dewan Negara
- n. Menyusun dan mengesahkan Tata Tertib Parlemen
- o. Membentuk Komite Tetap dan mendirikan komite-komite Parlemen yang lain.(UUD Republica Democratika de Timor Leste pasal 95)

2.2. Tipologi Gedung Parlemen

Gedung parlemen merupakan sarana penting dalam kebutuhan pengelolaan suatu negara yang digunakan sebagai tempat kerja atau beraktivitas para wakil rakyat, sebagai tempat kerja diharapkan memberi kondisi-kondisi seperti aman, nyaman sehingga dapat mendukung kegiatan yang berlangsung di dalamnya. Gedung parlemen juga merupakan tempat yang terbuka untuk masyarakat yang sudah mengirimkan para wakilnya, dan diberi kesempatan bertemu dan bertatap muka untuk memberi keluhan-keluhan tentang permasalahan-permasalahan yang timbul belum dibuat solusi-solusi yang dapat menyelesaikan persoalan.

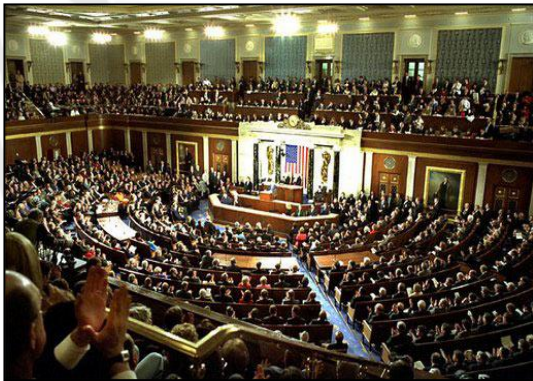
Gedung parlemen dapat juga sebagai tempat yang memberi harapan kepada masyarakat dalam suatu negara dimana para wakil rakyat yang diutus, dapat membuat undang-undang dan peraturan negara yang dapat menyentuh kepentingan negara dan rakyat, solusi-solusi yang dibuat oleh para wakil rakyat yang menyentuh

persoalan masyarakat, memberi rasa memiliki dari seluruh masyarakat dalam suatu negara terhadap parlemen dan gedung yang mengwadahnya.

Hasil dan kinerja yang didapat dari aktivitas dewan perwakilan rakyat di gedung parlemen yang memberi kemajuan nyata pada perkembangan suatu negara merupakan harapan utama dari masyarakat yang sudah mengirim wakilnya untuk duduk di parlemen.

Gedung parlemen termasuk dalam tipologi bangunan *Governmental and Public*, sebab memiliki fungsi-fungsi seperti perkantoran pemerintah yang melayani kepentingan masyarakat, akan tetapi gedung parlemen memiliki kebutuhan khusus seperti ruang paripurna yang lebih memiliki karakter seperti ruang *Teater*. Penataan dan susunan tempat duduk pada ruang sidan paripurna ada beberapa tipe berpatokan pada contoh penataan ruang paripurna beberapa negara:

1. Setengah lingkaran tersusun beda ketinggian memiliki titik orientasi yang sama ke area pengendali rapat(ketua)



Gambar 2.7 Ruang Paripurna Parlemen Amerika Serikat

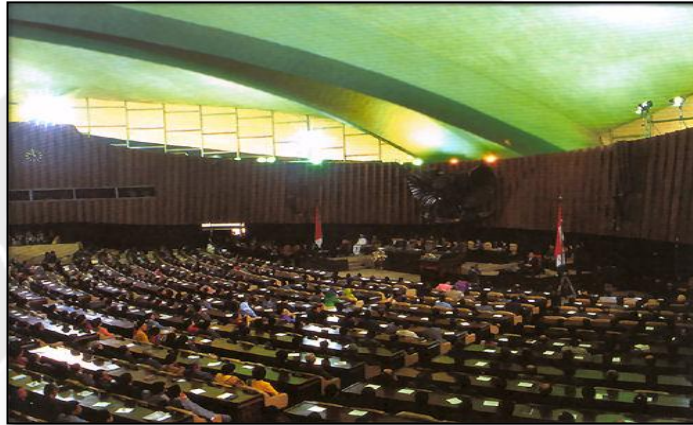
Sumber: Wikipedia, diakses 25 September 2012



Gambar 2.8 Ruang Paripurna Parlemen Finlandia

Sumber: www.suomeneduskunta.fi

2. Setengah lingkaran datar menghadap ke panggung (pengendali rapat atau ketua)



Gambar 2.9 Ruang Paripurna Parlemen Indonesia
Sumber: Wikipedia, diakses 25 September 2012

3. Berbentuk "U" tersusun beda ketinggian memiliki titik orientasi yang sama ke area pengendali rapat(ketua)



Gambar 2.10 Ruang Paripurna Parlemen Australia
*Sumber: www.naa.gov.au
diakses 25 September 2012*

4. Berbentuk lingkaran tersusun beda ketinggian orientasi terfokus ke tengah.



Gambar 2.11 Ruang Paripurna Parlemen Jerman

Sumber: www.naa.gov.au
diakses 25 September 2012



Gambar 2.12 Ruang Paripurna Parlemen RRC

Sumber: www.naa.gov.au
diakses 25 September 2012

5. Bentuk berhadapan tersusun beda ketinggian.



Gambar 2.13 Ruang Paripurna Parlemen Inggris
Sumber: www.parliament.uk (diakses 25 September 2012)

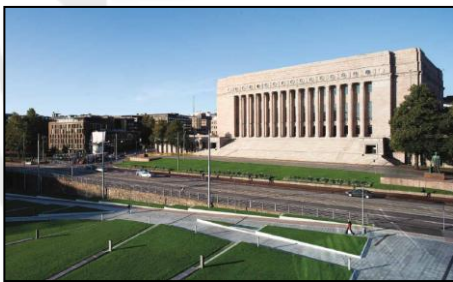
Ruang rapat paripurna memiliki tribun yang berfungsi sebagai tempat duduk untuk masyarakat dan pengamat kelompok masyarakat untuk menyaksikan jalannya rapat atau diskusi yang dilakukan oleh wakil mereka yang sudah diutus di parlemen, kondisi ini lebih merupakan untuk membangun kepercayaan antara masyarakat atau kelompok dengan para utusannya, sebagai masyarakat yang sudah mengutus wakilnya di parlemen harus memiliki kepedulian sebagai kontrol sosial untuk para wakil yang ada di parlemen, sehingga kinerja dewan perwakilan dapat lebih baik dan bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara.

2.3. Tinjauan Gedung Parlemen di Dunia

2.3.1. Gedung Parlemen di Finlandia.

Negara Finlandia terletak di Eropa barat dan keadaan politik selalu stabil, Parlemen Finlandia sudah berumur sekitar 250 tahun. Pada tahun 1923 sebuah kompetisi diadakan untuk mendesain Gedung Parlemen Finlandia yang baru. Kompetisi dilaksanakan pada tahun 1924 dan dimenangkan oleh perusahaan dari *Borg-Siren-Aberg* dengan proposal yang disebut *Oratoribus* (Bahasa Latin "untuk pembicara"). Arsiteknya adalah *Johan Sigfrid Siren*. Bangunan ini dibangun 1926-1931 dan diresmikan pada tanggal 7 Maret 1931, sejak saat itu bangunan tersebut digunakan sebagai gedung parlemen Negara Finlandia.

Johan Sigfrid Siren merancang Gedung Parlemen Finlandia dengan gaya arsitektur menggabungkan *neoclassicism* dengan *modernism*. Kombinasi yang dilakukan oleh *Siren*, tentang kolom disederhanakan dan façade menonjolkan empat belas kolom seperti bangunan *neoclassicism* di kota Korintus.



Gambar 2.14 Gedung Parlemen Finlandia
Sumber: www.suomeneduskunta.fi

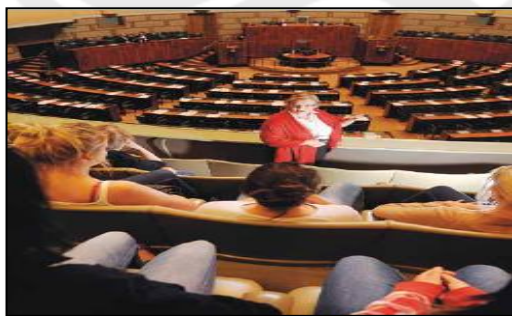


Gambar 2.15 Gaya Arsitektur Neoclassicism di Padukan dengan Facade Modernism pada Gedung Parlemen Finlandia
Sumber: www.suomeneduskunta.fi

Bangunan itu memiliki lima lantai, masing-masing lantai dihubungkan oleh sebuah tangga marmer putih dan lift.

1. Lantai pertama terdapat
 - Lobi utama
 - Ruang penerimaan

- Ruang pembereritaan
 - Pusat informasi
 - Kantor dokumentasi
 - Ruang percetakan dan restoran
2. Lantai dua berisi atau lantai utama terdapat
- Ruang paripurna
 - Galeri
 - Ruang publik
 - Media dan diplomat
 - *Hall of State* dan kafetaria.
3. Lantai ketiga terdapat
- Kantor pengelola
 - Termasuk fasilitas untuk unit informasi dan media dan menyediakan akses langsung ke galeri pers dan menghadap ke ruang paripurna.
4. Lantai empat terdapat
- Ruang komisi
5. Lantai lima terdapat
- Ruang pertemuan
 - Kantor untuk anggota parlemen
 - Fasilitas untuk media.



Gambar 2.16 Ruang Paripurna dan Tribun untuk Pengunjung di Gedung Parlemen Finlandia
Sumber: www.suomeneduskunta.fi



Gambar 2.17 Tribun untuk Pers di Gedung Parlemen Finlandia
Sumber: www.suomeneduskunta.fi



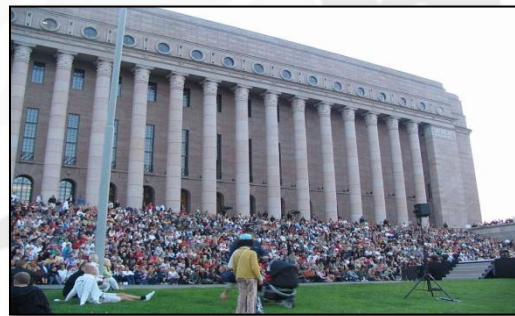
Gambar 2.18 Ruang Fraksi Parlemen Finlandia
Sumber: www.suomeneduskunta.fi



Gambar 2.19 Suasana Diskusi di Ruang Fraksi Parlemen Finlandia
Sumber: www.suomeneduskunta.fi



Gambar 2.20 Pengawasan Masyarakat Terhadap Parlemen di Parlemen Finlandia
Sumber: www.suomeneduskunta.fi



Gambar 2.21 Kedekatan Masyarakat dan Gedung di Parlemen Finlandia
Sumber: www.suomeneduskunta.fi

Sumber: website parlemen Finlandia, www.suomeneduskunta.fi, yang diterjemahkan bebas oleh penulis, akses 17 september 2012

2.3.2. Gedung Parlemen Jerman.

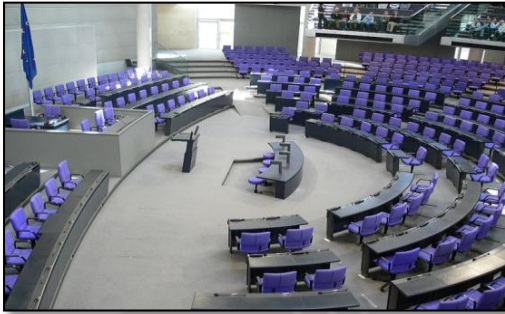
Raja Jerman *Wilhelm I*, negarawan *Otto Von Bismarck* dan anggota parlemen sepakat mengadakan sayembara untuk membangun gedung parlemen baru di Berlin pada tahun 1882. Dari 200 arsitek yang ikut sayembara, arsitek dari *Frankfurt Paul Wallot* yang memenagkan desain bangunan ini dengan konsep gaya *neo-baroque*.

Patung, ornamen dan relief untuk dekorasi dikerjakan oleh seniman patung *Otto Lessing*, peletakan batu pertama dilakukan oleh Raja *Wilhelm I* pada tahun 1884. Gedung parlemen Jerman mengalami rusak parah pada perang dunia ke II, setelah selesai perang gedung ini di rehabilitasi sesuai dengan modelnya yang lama, akan tetapi penataan interiornya dirubah lebih *modernism*.

Setelah penyatuan Jerman, pada tahun 1993 arsitek *Gottfried Bohn* mendesain atap kaca berbentuk kubah, didalam kubah terdapat tangga spiral 5 tingkat yang bisa naik ke atas untuk melihat pemandangan kota Jerman, di tangga spiral ini bisa melihat anggota parlemen berdebat di ruang paripurna. Dibawah atap kubah terdapat kerucut kaca yang terbalik yang bisa memantulkan cahaya matahari sebagai pencahayaan ruangan paripurna, sebagai ujud penghematan energi.



Gambar 2.22 Gedung Parlemen Jerman
Sumber: wikipedia. diakses 25 September 2012



Gambar 2.23 Penataan Ruang Paripurna Parlemen Jerman dengan Gaya Modernism
Sumber: wikipedia



Gambar 2.24 Ruang Paripurna dan Tribun untuk Masyarakat di Gedung Parlemen Jerman
Sumber: wikipedia

Sumber website parlemen jerman, www.bundestag.de, diakses 17 September 2012

2.3.3. Gedung Papua New Guinea.

Ketika Papua New Guinea (PNG) menjadi negara berdaulat pada tanggal 16 September 1975, perayaan penuh sukacita meletus di seluruh negeri. Dalam pembangunan bangsa, menjadi perhatian penting dari pemerintah PNG yakinkan Papua New Guinea akan menjalankan demokrasi di negara mereka yang baru merdeka, dan merasa bangga dengan budaya dan identitas nasional. Untuk meningkatkan kesadaran nasional, negara menjalankan program untuk kesejahteraan rakyat, pendidikan kewarganegaraan dan pelestarian budaya. Bendera dan lambang nasional sebagai lambang untuk Papua Guinea Baru sudah ada, pemerintah memulai sebuah bangunan yang ambisius di ibukota untuk memberikan perwujudan legitimasi dan cita-cita kebangsaan . Inti dari ini politik adalah mendirikan Gedung Parlemen baru.

1. Perencanaan Gedung Parlemen Papua New Guinea.

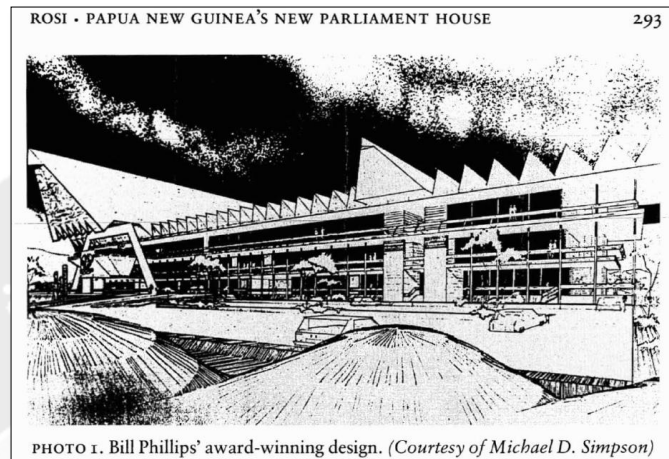
Rencana Gedung Parlemen baru Papua New Guinea di dirikan di pusat kota *Port Moresby*, akan tetapi karena kota ini semakin ramai maka di anggap tidak cocok, kemudian di rencanakan di kota *Arona* , geografis daerah yang terletak di daerah dataran tinggi di wilayah timur. Dibentuk sebuah komite

desain bekerja selama beberapa bulan untuk merencanakan dan menkonsultasikan apa yang diperlukan untuk mendirikan sebuah gedung parlemen. sebagai lambangkan warisan nasional dan kemerdekaan politik yang nyata, kemudian gedung parlemen di rencanakan untuk di dirikan di *Waigani* yang menjadi " bangunan utama " di kompleks gedung DPR baru yang mencakup *Independence Hill*, Museum Nasional, Galeri Seni , dan Mahkamah Agung:

- Gedung Parlemen harus terinspirasi dari ciri Papua New Guinea yang layak
- Dikembangkan dari arsitektur dan seni tradisional
- Menggunakan bahan-bahan lokal

Pada bulan Desember 1975 komite desain menyelesaikan pekerjaannya. Arsitek Departemen Pekerjaan Umum (DPW) sekitar sembilan puluh arsitek asing dan lokal serta drafter ditugaskan untuk bekerja pada konsep desain mengikuti panduan singkat yang sudah ditetapkan dengan anggaran pembangunan 6,4 juta kina (us \$6.700.000). Dari dua belas desain dikirim untuk pemerintah, rencana Cecil Hogan dipilih untuk pengembangan lebih lanjut .Para politisi sangat terkesan dengan desain Hogan.

Kemudian timbul beberapa kontroversi, setelah melalui beberapa proses yang selalu mengalami hambatan, maka mengadakan kompetisi terbuka pada tanggal 21 Desember 1977. Hasil dari kompetisi kedua yang diumumkan pada Mei 1978, Bill Phillips , seorang arsitek senior di DPW , dinyatakan sebagai pemenang dan diberikan hadiah 7.000 kina (US \$ 7.300) . Desain Phillips lebih kontemporer yang dramatis, terbuka, tropis - halaman dikelilingi tanaman, struktural mudah untuk dibangun.

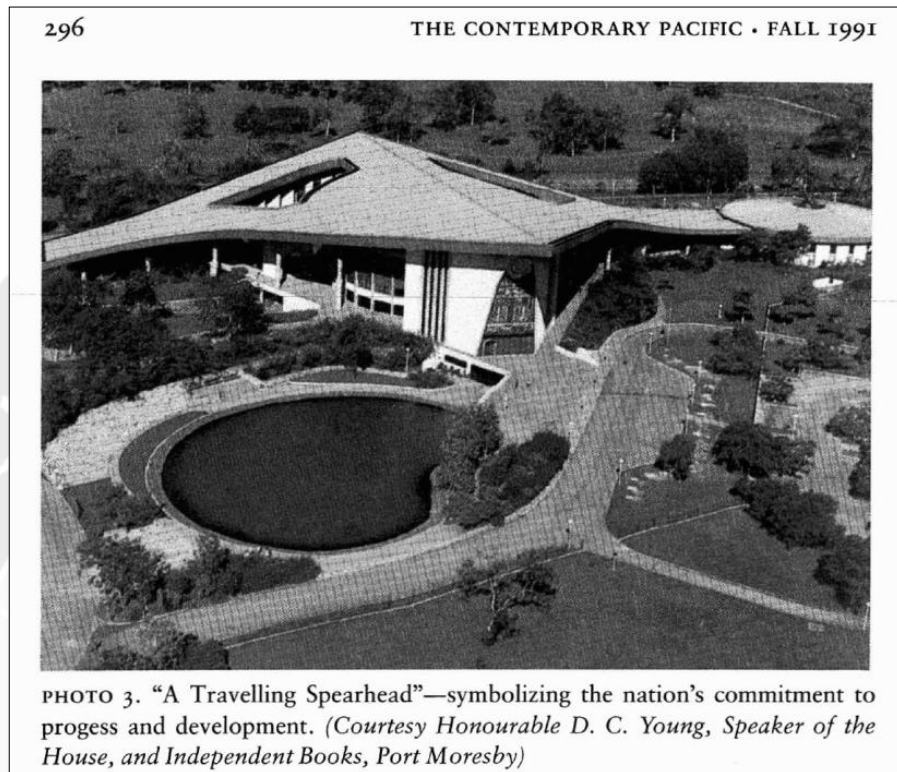


Gambar 2.25 Konsep Desain Bill Phillips pada Gedung Parlemen PNG
Sumber: Pamela C Rosi, *Papua New Guinea's New Parliament House: A Contested National Symbol. The Contemporary Pacific, Vol 3, No 2, Fall 1991, 289-323, ©1991 by Universit of Hawai Pres.*

Tiga bulan kemudian, kabinet memutuskan untuk kembali ke desain Hogan dan Phillips mengambil tindakan hukum, pada bulan Juni 1979, Phillips menerima penyelesaian 25.000 kina (us \$ 26.000) sebagai denda pembatalan desain dari pemerintah PNG. Alasan untuk membatalkan desain Phillips

- Desain Phillips dianggap ketinggalan jaman
- Karena tidak memenuhi persyaratan fungsional terbaru untuk bangunan yang ditentukan oleh para politisi dan pejabat pemerintah
- Tidak menggunakan bahan tradisional

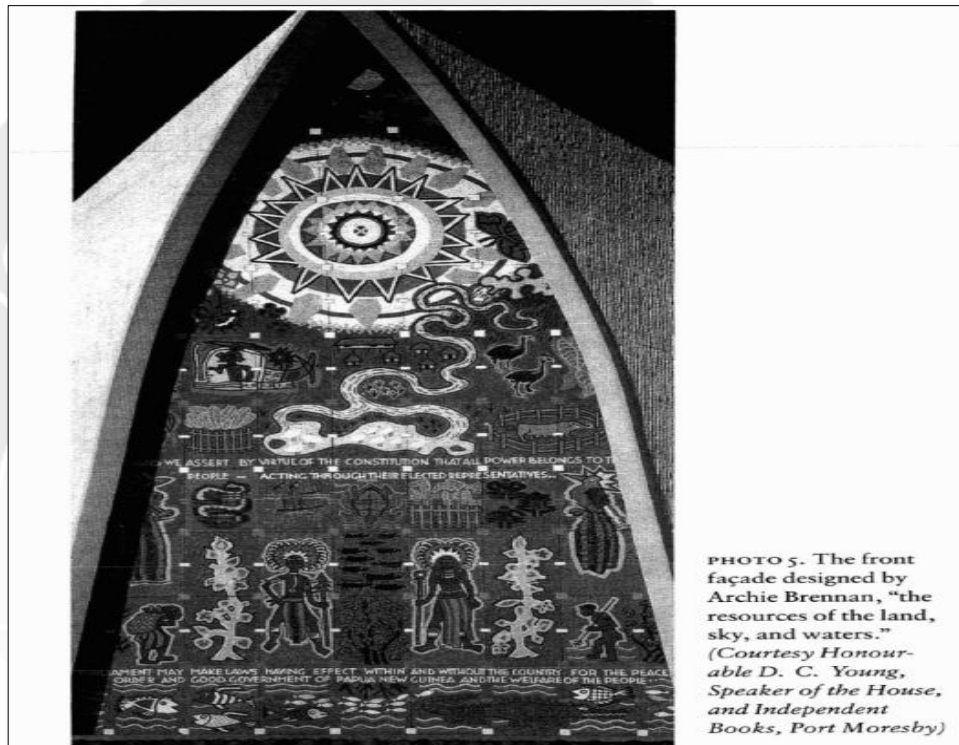
Pada bulan Agustus 1978 , Dewan Eksekutif Nasional akhirnya meratifikasi desain Hogan sebagai desain untuk gedung parlemen PNG



Gambar 2.26 Konsep Cecil Hogan pada Gedung Parlemen PNG
Sumber: Pamela C Rosi, *Papua New Guinea's New Parliament House: A Contested National Symbol. The Contemporary Pacific, Vol 3, No 2, Fall 1991, 289-323, ©1991 by Universit of Hawai Pres.*

Di bangun di dekat sebuah danau yang airnya melambangkan bahwa Papua Guinea adalah sebuah negara kepulauan, Gedung Parlemen adalah transformasi eksplisit dari tradisi arsitektur semangat Melanesia dan memenuhi unsur rumah tradisional. Bangunan baru ini dimaksudkan " untuk bertahan lama". *The Parliament House* adalah sebuah monumen megah . Meskipun membangun memberikan penampilan struktur tunggal ,tetapi memiliki tiga kompleks, unit (A , B , dan C) dihubungkan oleh jalan setapak, atap lebih dari penutup fungsional , untuk itu dibentuk sebagai sebuah perjalanan ujung tombak untuk melambangkan kekuatan bangsa dan komitmen untuk kemajuan dan pengembangan.

unit A , unit terbesar dan paling terlihat , terdapat gerbang pintu masuk hall
unit B , adalah terletak tepat di belakang ruang debat
unit C , yang bergabung ke tangan kiri busur besar Parlemen



Gambar 2.27 Ornamen Tradisional pada Gedung Parlemen PNG

Sumber: Pamela C Rosi, *Papua New Guinea's New Parliament House: A Contested National Symbol. The Contemporary Pacific, Vol 3, No 2, Fall 1991, 289-323*, ©1991 by Universit of Hawai Pres.

Atap rumah adalah sebuah bangunan bundar dengan atap puncak kecil . melingkar ini bentuk karakteristik rumah pertemuan laki-laki di dataran tinggi , dan puncak adalah fitur khas daerah *Chimbu*, ada ruang untuk upacara resmi seperti untuk menandatangani perjanjian internasional. Desain Hogan menyatukan dua struktur tradisional memiliki signifikansi luar tingkat desa untuk mewakili wilayah geografis utama negara (yaitu , dataran tinggi dan dataran rendah , pantai dan pedalaman) .

Dengan menghubungkan kedua struktur ini bersama di bawah satu atap, metafora sebuah gambar dibuat persatuan nasional dan identitas di negeri itu.

Untuk memperkaya rencana desain dasar, Gedung Parlemen telah terisi dengan unsur-unsur dekoratif yang membuat referensi eksplisit untuk beragam tradisi artistik bangsa sembilan belas provinsi dan sumber daya negara yang kaya. Di bagian depan bangunan, menempati ruang besar yang memberi gambaran tradisional dan tokoh-tokoh leluhur, menggambarkan suasana alam dan mengembangkan sumber daya bangsa.

2. Ruang Paripurna Gedung Parlemen Papua New Guinea.

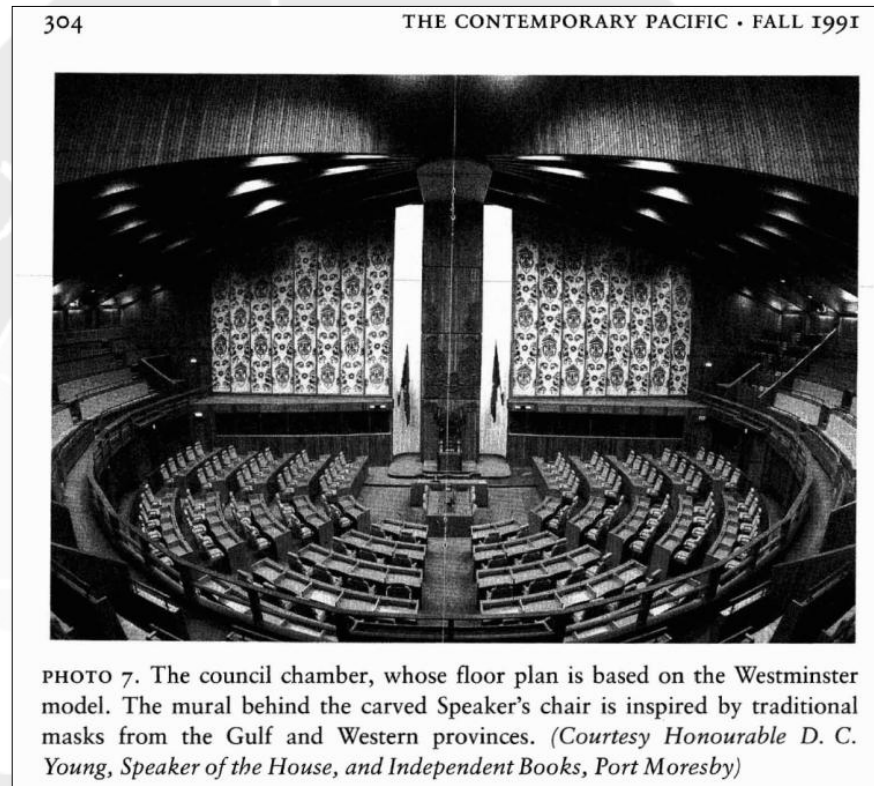
Masuk dari tangga utama, ruang dewan oval adalah simbolik pusat kompleks Parlemen, menandakan kesatuan yang demokratis tradisi politik pribumi Melanesia. Dibangun di atas dua tingkat sehingga galeri publik menghadap ruang paripurna. *Parliament House* diberdayakan sebagai representasi kebanggaan nasional dan identitas karena interaksi makna yang dibuat, pilihan bahan bangunan dan teknologi yang diterapkan sebagai gambaran berlapis yang menghubungkan masa lalu dan sekarang dan membangun citra kesatuan dalam keragaman budaya untuk mewujudkan kepentingan bangsa.

Pada tahun 1976, ketika Cecil Hogan menjadi pemenang kompetisi desain pertama, rencananya itu dengan harga sekitar 7 juta kina (US \$ 7,3 juta). Mulai konstruksi pada tahun 1980, angka ini meningkat menjadi 12,9 juta kina (US \$ 13.400.000). Empat tahun kemudian, bangunan itu selesai pada akhir biaya 23,4 juta kina (US \$ 24.300.000).

Gedung parlemen PNG dipenuhi dengan berbagai ekspresi artistik keterampilan dan tradisi Papua New Guinea dapat mengenali dan mengagumi, Gedung parlemen mewujudkan tujuan nasional kelima konstitusi untuk mencapai pembangunan Papua New Guinea. Gedung Parlemen merupakan struktur modern yang mewakili teknologi dan pendidikan yang berakar dan menjadi warisan.

Dalam program ikonografi padat bangunan, gagasan-gagasan ini dimainkan dalam tema-tema beragam menghubungkan komponen arsitektur geografis wilayah negara, memadukan teknologi tradisional dan modern

membentuk gedung DPR dari sumber yang beragam, dari tanah , dan sintesis berbagai bangsa ekspresi artistik dan keterampilan untuk membuat gambar kebangsaan. Model visual yang mengartikulasikan identitas nasional menenun helai bersama-sama atau perakitan elemen desain sebagai mosaik



Gambar 2.28 Ruang Paripurna Gedung Parlemen PNG

Sumber: Pamela C Rosi, *Papua New Guinea's New Parliament House: A Contested National Symbol. The Contemporary Pacific, Vol 3, No 2, Fall 1991, 289-323, ©1991 by Universit of Hawai Pres.*

Pengakuan publik merupakan suatu dukungan, dengan demikian diberikan kepada pentingnya unit-unit yang lebih kecil dalam menyusun keseluruhan yang lebih besar. Dalam ideologi nasionalis program ikonografi Gedung Parlemen, Papua New Guinea dicitrakan sebagai lahan sumber daya alam yang besar yang potensial untuk pembangunan nasional tergantung pada kerja keras , publik kewaspadaan , dan kemauan untuk bekerja sama. Berdiri di pintu masuk, kumpulan patung mengesankan tiang diukir berbicara



kepada signifikansi seni tidak hanya sebagai objek estetika yang bermakna, tetapi sebagai kreatif proses kolaboratif. Untuk dinilai sebagai ekspresi asli atau kedaerahan atau dari tradisi sebagai representasi dari identitas nasional.

Untuk memahami maknanya bangunan sebagai konstruksi dinamis yang nilainya berasal dari interaksi konstan politik dan sejarah (Handler dan Linnekin 1984). Mengingat kemudaan dari budaya, bahwa Gedung Parlemen tersebut dibangun berdasarkan sistem demokrasi, semua masah yang ada sama sekali tidak di lupakan, dan bahwa sistem demokrasi masih itu merupakan bekerja yang harus di lengkapi, meskipun krisis sipil yang sedang berlangsung di Bougainville dan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang mendalam lainnya .

Ideologi nasional menyatakan hiasan dari *Parliament House* - adalah bukan retorika kosong , melainkan melibatkan kekuatan seni untuk meningkatkan nasional kesadaran dan kebanggaan di Papua New Guinea . Dilihat dengan cara ini , Gedung Parlemen lebih dari model *society*. Sebagai model atau masyarakat berfungsi untuk membuat nilai-nilai nasional terlihat baru dan masalah budaya dalam proses terus-menerus membentuk dan membentuk kembali konsepsi identitas nasional .

Sumber:Pamela C Rosi, *Papua New Guinea's New Parliament House:A Contested National Symbol, The Contemporary Pacific, Volume 3, Number 2, Fall 1991, 289-323*© 1991 by University of Hawaii Press. Yang diterjemahkan bebas oleh penulis, 25 Februari 2014



2.4. Persyaratan dan Standar-standar Perencanaan dan Perancangan Gedung Negara

Gedung parlemen merupakan gedung negara yang keberadaannya terletak di ibu kota negara sebagai pengendali pusat pemerintahan. Gedung parlemen termasuk dalam bangunan gedung negara dengan klasifikasi bangunan khusus.

Bangunan khusus adalah: Bangunan gedung negara yang memiliki kegunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus. Masa penjaminan kegagalan bangunan adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun, gedung kantor yang belum ada desain prototipenya, atau gedung kantor dengan luas di atas 500 m², atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai. (Permen PU No 45/PRT/M/2007, Bab II poin A).

- Istana negara dan rumah jabatan presiden
- Wisma negara
- Gedung bersifat monumental
- Gedung perwakilan di luar negeri

Ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi pada bangunan gedung negara atau pemerintah, yang termasuk dalam kategori bangunan tidak sederhana.

2.4.1. Standar Luas Bangunan Gedung Negara.

1. Gedung Kantor

- a. Standar lusa ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk klasifikasi sederhana rata-rata sebesar 9,6 m² per personil.
- b. Standar lusa ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk klasifikasi tidak sederhana rata-rata sebesar 10 m² per personil.
- c. Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat di hitung berdasarkan kebutuhan yang akan di tampun.

(Permen PU No 45/PRT/M/2007)

2. Rumah Negara

Standar luas rumah negara ditentukan sesuai dengan tipe peruntukannya

Tabel 2.1 Standar Luasan Rumah Negara

Tipe	Luasan Bangunan	Luasan Lahan
Khusus	400 M ²	1000 M ²
A	250 M ²	600 M ²
B	120 M ²	350 M ²
C	70 M ²	200 M ²
D	50 M ²	120 M ²
E	36 M ²	100 M ²

Sumber: Permen PU No 45/PRT/M/2007

2.4.2. Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan.

1. Peruntukan lokasi sesuai dengan RTRW dan RTBL kota setempat
2. Koefisien dasar bangunan (KDB) mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang bangunan gedung.
3. Koefisien luas bangunan (KLB) mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang bangunan gedung.
4. Ketinggian bangunan sesuai dengan ketinggian maksimum bangunan pada lokasi setempat.
5. Ketinggian langit-langit gedung kantor minimum 2.80 meter dari permukaan lantai, atau fungsi yang memerlukan ketinggian langit-langit khusus.
6. Jarak antar blok atau masa bangunan minimal 3 meter atau dengan pertimbangan; bahaya kebakaran, sirkulasi udara dan pencahayaan alami, kenyamanan bangunan, keselarasan dan keseimbangan dengan lingkungan.
7. Koefisiensi dasar hijau (KDH): daerah resapan air, bangunan yang mempunyai KDB kurang dari 40% harus mempunyai KDH minimum 15%.
8. Garis sempadan bangunan mengikuti RTBL atau peraturan daerah lokasi bersangkutan.

9. Wujud arsitektur.

- a. Mencerminkan fungsi sebagai gedung negara.
- b. Seimbang, serasi, selaras dengan lingkungannya.
- c. Indah namun tidak berlebihan.
- d. Efisien dalam penggunaan sumberdaya baik dalam pemamfaatan maupun pemeliharaan.
- e. Mempertimbangkan nilai sosial budaya setempat dalam penerapan konsep arsitektur dan rekayasanya.
- f. Mempertimbangkan kaidah pelestarian bangunan baik sejarah maupun langgam arsitekturnya.

10. Kelengkapan sarana dan prasarana bangunan.

- a. Sarana parkir kendaraan.
- b. Sarana untuk penyandang cacat dan lansia.
- c. Sarana penyediaan air minum.
- d. Sarana drainase, limbah dan sampah.
- e. Sarana ruang terbuka hijau.
- f. Sarana pencegah kebakaran.
- g. Sarana pencahayaan halaman.
- h. Sarana jalan masuk dan keluar.
- i. Fasilitas toilet, ruang ganti dan fasilitas komunikasi dan informasi

11. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) mengikuti peraturan tenaga kerja dan keselamatan kerja.
(Permen PU No 45/PRT/M/2007)

2.4.3 Persyaratan Utilitas Bangunan.

1. Air minum

- Untuk kebutuhan rata-rata 100 liter/ orang/ hari
- Air untuk kebutuhan pemadam kebakaran minimum beroperasi selama 45 menit

- Bahan untuk instalasi air sesuai standard teknik yang ditentukan
2. Pembuangan air kotor.
 - Dialirkan ke saluran umum
 - Pembuangan harus melalui pipa tertutup atau terbuka sesuai dengan persyaratan teknik yang berlaku
 - Dalam kondisi tertentu pembuangan air kotor harus dilakukan melalui proses pengolahan atau peresapan
 - Air kotor dari kakus harus masuk ke dalam *septictank* dan diolah menurut standard yang berlaku
 3. Pembuangan sampah.
 - Tempat penampungan sampah sementara disesuaikan dengan kebutuhan, produk sampah minimum 3.0 liter/ orang/ hari.
 - Tempat penampungan sampah sementara terbuat dari bahan kedap air, mempunyai penutup, dapat dijangkau secara mudah oleh petugas kebersihan.
 4. Saluran air hujan.

Air hujan harus diresapkan kedalam tanah sebelum dialirkan ke saluran umum kota.
 5. Sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
 - Alat penginderaan/peringatan dini kebakaran sesuai dengan standar.
 - Hidran dan selang kebakaran, hidran ditempatkan pada jarak 35 m satu dengan yang lain
 - Pemadam kebakaran dari busa ditempatkan Pada ruang penyimpanan dokumen.
 6. Instalasi listrik.
 - Pemasangan instalasi listrik harus aman dan atas dasar perhitungan sesuai dengan peraturan

- Setiap gedung negara harus memiliki pembangkit listrik darurat sebagai cadangan
 - Penggunaan pembangkit listrik darurat tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar
7. Penerangan dan pencahayaan.
- Setiap bangunan gedung negara harus mempunyai pencahayaan alami dan pencahayaan buatan yang cukup sesuai dengan fungsi ruang dalam bangunan tersebut.
8. Penghawaan dan penkondisian udara.
- Setiap bangunan gedung negara harus mempunyai sistem penghawaan alami dan buatan yang cukup untuk menjaga sirkulasi udara yang segar di dalam ruangan
 - Ketentuan teknis sistem penghawaan alami dan buatan mengikuti standar yang berlaku
9. Sarana transportasi dalam bangunan gedung.
- Setiap bangunan harus menyediakan transportasi vertikal yang aman dan nyaman berupa tangga, ramp, eskalator, elevator (*lift*).
 - Penempatan jumlah tangga dan ramp harus memperhatikan fungsi dan luasan bangunan gedung, kemiringan tangga maksimum 35° , ramp 7° .
 - Penggunaan eskalator dapat dipertimbangkan untuk pemenuhan kebutuhan khusus dengan memperhatikan keselamatan pengguna dan keamanan konstruksi
 - Penggunaan *lift* harus diperhitungkan berdasarkan fungsi bangunan, jumlah pengguna, waktu tunggu, dan jumlah lantai bangunan.
 - Pemilihan jenis *lift* harus mempertimbangkan kemudahan bagi penyandang cacat, lanjut usia dan kebutuhan khusus.
 - salah satu *lift* harus menggunakan selubung *lift* dengan dinding tahan api yang dapat di gunakan sebagai *lift* kebakaran

10. Sarana Komunikasi.

- Bangunan gedung harus di lengkapi dengan sarana komunikasi internal dan eksternal.
- Jenis dan sarana komunikasi berdasarkan pada fungsi bangunan dan kewajaran kebutuhan.

11. Sistem Penangkal Petir.

- Jenis dan jumlah penangkal petir untuk bangunan gedung negara harus berdasarkan perhitungan yang mengacu pada lokasi bangunan, fungsi dan kewajaran kebutuhan.
- Sistem penangkal petir harus sesuai dengan standar dan ketentuan.

12. Instalasi Gas.

- Instalasi gas yang dimaksud; gas LPG, untuk medis gas oksigen (O_2), dinitro oksida (N_2O), dan carbon dioksida (CO_2).
- Ketentuan teknis instalasi mengikuti standar dan pedoman teknis.

13. Kebisingan dan Getaran.

- Gedung negara memperhatikan batas tingkat kebisingan dan atau getaran sesuai dengan fungsinya dengan memperhatikan kenyamanan dan kesehatan.

14. Aksesibilitas dan Fasilitas Bagi Penyandang cacat dan yang Kebutuhan Khusus.

- Bangunan gedung negara yang berfungsi untuk pelayanan umum harus dilengkapi dengan fasilitas yang memberukan kemudahan bagi penyandang cacat dan yang berkebutuhan khusus antara lain lansia, ibu hamil dan menyusui, seperti rambu dan marka, parkir, ramp, tangga, lift, kamar mandi, wastafel, jalur pemandu, telepon dan ruang ibu dan anak.

(Permen PU No 45/PRT/M/2007)

2.4.4. Persyaratan Sarana Pelayanan.

1. Tangga Darurat

- Setiap bangunan gedung negara yang bertingkat lebih dari 3 lantai, harus mempunyai tangga darurat/penyelamatan minimal dua buah dengan jarak maksimum 45 m.
- Tangga darurat/penyelamatan di lengkapi dengan pintu tahan api, minimum 2 jam, dengan arah pembukaan ke tangga dan dapat menutup secara otomatis dan dilengkapi fan untuk memberu tekanan positif. Pintu harus di lengkapi dengan lampu dan petunjuk KELUAR atau EXIT yang menyala saat lintrik/PLN padam, lampu exit dipasok dari baterai UPS.
- Tangga darurat/penyelamatan yang terletak dalam bangunan harus dipisahkan dari ruang-ruang lain dengan pintu tahan api dan bebas asap, pencapaian mudah, jarak pencapaian maksimal 45 m dan minimal 9 m
- Lebar tangga darurat/penyelamatan minimum adalah 1,2 m.
- Lebar tangga darurat/penyelamatan tidak boleh berbentuk tangga melingkar vertikal, exit pada lantai dasar langsung ke arah luar.

2. Pintu Darurat.

- Setiap bangunan gedung negara yang bertingkat lebih dari 3 lantai harus di lengkapi dengan pintu darurat minimal 2 buah.
- Lebar pintu darurat minimal 100 cm, membuka ke arah tangga penyelamatan, kecuali pada lantai dasar membuka ke arah luar (halaman).
- Jarak pintu darurat maksimum dalam radius/jarak capai 25 m dari setiap titik posisi orang dalam satu blok bangunan gedung.

3. Pencahayaan Darurat dan Tanda Penunjuk arah exit.

- Setiap bangunan gedung negara untuk pelayanan dan kepentingan umum harus dilengkapi dengan pencahayaan

darurat dan tanda penunjuk arah keluar yang menyala saat keadaan darurat.

- Tanda keluar/exit atau anak panah petunjuk arah harus di letakan pada persimpangan koridor, jalan keluar menuju ruang tangga darurat, balkon atau teras dan pintu menuju tangga darurat.

4. Koridor atau Selasar.

- Lebar koridor bersih minimum 1,80 m.
- Jarak setiap titik dalam koridor ke pintu darurat atau arah keluar yang terdekat tidak boleh lebih dari 25 m.
- Koridor harus di lengkapi dengan tanda-tanda petunjuk yang menunjukkan ke arah ke pintu darurat atau arah keluar.
- Panjang gang buntu maksimum 15 m apabila di lengkapi dengan sprinkler dan 9 m tanpa sprinkler.

5. Sistem Peringatan Bahaya.

- Setiap bangunan gedung negara untuk pelayanan dan kepentingan umu seperti kantor harus dilengkapi dengan sistem komunikasi internal dan sistem peringatan bahaya.

6. Fasilitas Penyelamatan.

- Setiap lantai bangunan gedung negara harus di beri fasilitas penyelamatan berupa meja yang cukup kuat, sarana evakuasi yang memadai sebagai fasilitas perlindungan saat terjadi bencana.

(Permen PU No 45/PRT/M/2007)

Tabel 2.2 Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Pemerintah / Lembaga Tinggi / Tertinggi Negara.

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	KHUSUS	
A	PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN				
	1. Jarak Antar Bangunan	minimal 3 m	minimal 3 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.		Berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, serta ketentuan dalam Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan.
	2. Ketinggian Bangunan	maksimum 2 lantai	maksimum 8 lantai (di atas 8 lantai harus mendapat rekomendasi Menteri Pekerjaan Umum)		
	3. Ketinggian Langit-langit	min. 2,80 m	min. 2,80 m	sesuai fungsi	
	4. Koefisien Dasar Bangunan	Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	5. Koefisien Lantai Bangunan	Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	6. Koefisien Dasar Hijau	Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	7. Garis sempadan	Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	8. Wujud Arsitektur	sesuai fungsi & kaidah arsitektur sederhana	sesuai fungsi & kaidah arsitektur	sesuai fungsi & kaidah arsitektur	
	9. Pagar Halaman **)	Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu) , besi, baja , kayu, dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan.			
	10. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lingkungan *)				
	- parkir kendaraan	minimal 1 parkir kendaraan untuk 60 m ² luas bangunan gedung			
	- aksesibilitas	tersedia sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat			
	- drainase	tersedia drainase sesuai SNI yang berlaku			
	- pembuangan sampah	tersedia tempat pembuangan sampah sementara			
	- pembuangan limbah	tersedia sarana pengolahan limbah, khususnya untuk limbah berbahaya			
	- penerangan halaman	tersedia penerangan halaman			

Lanjutan Tabel 2.2

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	KHUSUS	
B	PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN				Diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat/ produksi dalam negeri, termasuk bahan bangunan sebagai bagian dari sistem pabrikasi komponen. Apabila bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi persyaratan fungsi dan mutu dengan pengesahan Instansi Teknis Setempat.
	1. Bahan Penutup Lantai	keramik, vinil, tegel PC	marmar lokal, keramik, vinil, kayu	marmar lokal, keramik, vinil, kayu	
	2. Bahan Dinding Luar	bata, batako diplester dan dicat, kaca	bata, batako diplester dicat/dilapis keramik, kaca, panil beton ringan	bata, batako diplester dicat/dilapis keramik, kaca, panil beton ringan	
	3. Bahan Dinding Dalam	bata, batako diplester dan dicat, kaca, partisi kayu lapis	bata, batako diplester dicat/dilapis keramik, kaca, partisi gipsum	bata, batako diplester dicat/dilapis keramik, kaca, partisi gipsum	
	4. Bahan Penutup Plafond	kayu-lapis dicat	gipsum, kayu-lapis dicat	gipsum, kayu-lapis dicat	
	5. Bahan Penutup Atap	genteng, asbes, seng, sirap	genteng keramik, aluminium gelombang dicat	genteng keramik, aluminium gelombang dicat	
	6. Bahan Kosen dan Daun Pintu	kayu dicat/aluminium	kayu dipelitur, anodized aluminium	kayu dipelitur, anodized aluminium	
C	PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN				Khusus untuk daerah gempa, harus direncanakan sebagai struktur bangunan tahan gempa.
	1. Pondasi	batu belah, kayu, beton-bertulang K-200	batu belah, kayu, beton-bertulang K-225 atau lebih	batu belah, kayu, beton-bertulang K-225 atau lebih	
	2. Struktur Lantai (khusus untuk bangunan gedung bertingkat)	beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat II	beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu klas kuat II	beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu klas kuat II	
	3. Kolom	beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat II	beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu klas kuat II	beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu klas kuat II	
	4. Balok	beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat II	beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu klas kuat II	beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu klas kuat II	
	5. Rangka Atap	kayu klas kuat II, baja	kayu klas kuat II, baja dilapis anti karat	kayu klas kuat II, baja dilapis anti karat	
	6. Kemiringan Atap	genteng min. 30°, sirap min. 22.5°, seng min 15°	genteng min. 30°, sirap min. 22.5°, seng min 15°	genteng min. 30°, sirap min. 22.5°, seng min 15°	

Lanjutan Tabel 2.2

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	KHUSUS	
D	PERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN				
	1. Air Bersih	PAM, sumur pantek	PAM, sumur pantek	PAM, sumur pantek	
	2. Saluran air hujan	talang, saluran lingkungan	talang, saluran lingkungan	talang, saluran lingkungan	
	3. Pembuangan Air Kotor	bak penampung	bak penampung	bak penampung	
	4. Pembuangan Kotoran	bak penampung	bak penampung	bak penampung	
	5. Bak SeptikTank & resapan	berdasarkan kebutuhan	berdasarkan kebutuhan	berdasarkan kebutuhan	
	6. Sarana Pengamanan thp. Bahaya Kebakaran *)	Mengikuti ketentuan dalam Kep. Meneg. PU No. 10/KPTS/2000 dan Kep. Meneg. PU No. 11/KPTS/2000, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.			
	7. Sumber daya listrik *)	PLN, Generator (Penggunaan daya listrik harus memperhatikan prinsip hemat energi)			
	8. Penerangan	100-215 lux/m ² , dihitung berdasarkan kebutuhan dan fungsi bangunan/fungsi ruang serta SNI yang berlaku			penerangan alam dan buatan
	9. Tata Udara	6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*)	6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*)	6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*)	dihitung sesuai SNI yang berlaku.
	10. Sarana Transportasi Vertikal *)	tidak diperlukan	untuk bangunan di atas 4 lantai dapat menggunakan Liff sesuai SNI yang berlaku.		dihitung sesuai kebutuhan dan fungsi bangunan
	11. Aksesibilitas bagi penyandang cacat*)	Sesuai ketentuan dalam Per.Men. PU No. 30/KPTS/2006, minimal ramp untuk bangunan klasifikasi sederhana.			
	12. Telepon *)	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	
	13. Penangkal petir	penangkal petir lokal	penangkal petir lokal	penangkal petir lokal	
E	PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN				
	1. Tangga Penyelamatan (khusus untuk bangunan bertingkat)	lebar minimal = 1, 20 m, dan bukan tangga putar	lebar minimal = 1, 20 m, dan bukan tangga putar	lebar minimal = 1, 20 m, dan bukan tangga putar	jarak antar tangga maksimum 45 m (bila menggunakan sprinkler jarak bisa 1,5 kali)
	2. Tanda Penunjuk Arah	jelas, dasar putih huruf hijau			
	3. Pintu	lebar min.=0,90 m, satu ruang minimal 2 pintu dan membuka keluar			
	4 Koridor/selasar	lebar min.=1,80 m	lebar min.=1,80 m	lebar min.=1,80 m	

*) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per-m², dan dianggarkan tersendiri sebagai biaya non-standar.

**) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per-m² bangunan gedung negara, dan dianggarkan tersendiri sesuai dengan harga satuan tertinggi per-m² bangunan pagar gedung negara

Sumber: Permen PU No 45/PRT/M/2007

Tabel 2.3 Standar Luas Ruang Kerja Gedung Kantor

JABATAN	LUAS RUANG (m ²)										KETERANGAN
	RG. KERJA	RG. TAMU	RG. RAPAT	RG. RAPAT UTAMA	RG. SEKRET	RG. TUNGGU	RG. SIMPAN	RG. ISTIRAHAT	RG. TOILET	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Menteri	28.00	40.00	40.00	140.00	58.00	60.00	14.00	20.00	6.00	406.00	Standar luas ruang tersebut merupakan acuan dasar, yang dapat disesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabatan.
2 Eselon IA	16.00	14.00	20.00	90.00	20.00	18.00	5.00	10.00	4.00	197.00	
3 Eselon IB	16.00	14.00	20.00	0.00	10.00	9.00	5.00	5.00	3.00	82.00	
4 Eselon IIA	14.00	12.00	14.00	0.00	10.00	12.00	3.00	5.00	3.00	73.00	
5 Eselon IIB	14.00	12.00	10.00	0.00	5.00	6.00	3.00	5.00	3.00	58.00	
6 Eselon IIIA	12.00	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	24.00	
7 Eselon IIIB	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	21.00	
8 Eselon IV	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	
9 Eselon V	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	
10 Staf	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	

B. RUANG PENUNJANG

- 1. Ruang Rapat = 40 m²
- 2. Ruang Studio = 4 m²/ orang (pemakai = 10% dari staf)
- 3. Ruang Arsip = 0,4 m²/ orang (pemakai = staf)
- 4. WC = 2 m²/ 25 orang
- 5. Musholla = 0,8 m²/ orang (pemakai 20% dari personil)

Sumber: Permen PU No 45/PRT/M/2007

2.5. Bangunan Sebagai Ikon.

1. Memunculkan bangunan sebagai ikon.

Dengan mengangkat identitas budaya setempat dalam perancangan Gedung parlemen *República Democrática de Timor Leste* diaplikasikan dengan pendekatan Post modern sehingga bangunan bisa menjadi ikon kota setempat, dengan pemahaman mengkomunikasikan unsur-unsur etnik dengan pertimbangan berbagai macam konteks sehingga wujud bangunan yang di harapkan dapat saling mendukung.

- Penampilan bangunan dapat memberi ungkaapan makna.
- Penampilan exterior menggambarkan budaya setempat
- Komposisi massa menggambarkan kesatuan

2. Pendekatan Dalam Desain. (Sumber: Pendekatan dalam perancangan arsitektur, Markus

Zahnd, Hal: 27)

- Fungsi ruang
- Lokasi ruang
- Wujud ruang
- Batasan ruang
- Urutan ruang
- Aturan ruang
- Tata Ruang